

## **DAMPAK POLITIK DAN EKONOMI PENGHAPUSAN PAJAK KARBON PADA MASA PEMERINTAHAN TONY ABBOTT TAHUN 2014**

**Amalia Yuliasih<sup>1</sup>**  
**Nim. 1202045086**

### ***Abstract***

*The abolition of the carbon tax is one of the environmental policies in Australia undertaken by Tony Abbott in 2014 which has had an impact on several aspects. The purpose of this research was to determine the political and economic impact of the abolished carbon tax on Tony Abbott's Government in 2014-2016. This research uses descriptive type of research to describe the political and economic impacts of the abolished carbon tax on Tony Abbott's Government. The research uses secondary data obtained by library research and the data analysis technique uses is qualitative. In this research the author uses the concept of carbon tax and decision making theory to perform the analysis. The results show that internal and external factors contribute to the successful abolishment of the policy (carbon tax). They also have both positive and negative impacts on the political and economic aspects of Australia. The internal factors are from the insistence of Australian political parties and the public, while external factors are from foreign mining entrepreneurs in Australia. The political impacts of carbon abolition can be seen in the rise of the political party's electability prevailing at the time, implementation of new carbon-replacement policy, and international media responses. Economic impacts include savings of A\$550 per household, increased energy production and consumption in Australia.*

***Keywords:*** Carbon Tax Abolition, Impact on Political and Economic, Australia.

### **Pendahuluan**

Fokus utama dalam politik internasional abad dua puluh berkembang pada masalah lingkungan global yang berhubungan dengan aspek lain seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Melalui Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 negara maju yang tergabung dalam anggota Annex I wajib menurunkan emisi karbon sebesar 5% pada tahun 2020 untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Salah satu negara yaitu Australia karena telah menghasilkan emisi CO<sub>2</sub> perkapita mencapai 17.73 metrik ton dimana jumlah ini jauh di atas rata-rata emisi CO<sub>2</sub> perkapita yang dihasilkan seluruh negara dan negara maju yaitu 4,1 ton, (<http://www.indexmundi.com> diakses 28 November 2015). Mayoritas perekonomian

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Email : amaliayuliasih94@gmail.com

di Australia banyak mengandalkan sektor industri domestik maupun investasi asing sebagai salah satu kontributor bagi pendapatan nasional negara. Sektor industri tersebut banyak menghasilkan bahan bakar fosil (BBF) dalam proses produksinya sehingga menjadi sumber polutan aktif yang mencemari lingkungan

Langkah awal pemerintah Australia mengurangi masalah lingkungan di negaranya yaitu dengan meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 12 Desember 2007. Selanjutnya Australia menetapkan kebijakan yang berbeda dalam pemerintahan yang sedang berkuasa untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd mulai memperkenalkan *Carbon Pollution Reduction Scheme* (CPRS) dengan skema karbon dalam sistem *Emission Reduction Fund* (ETS) setelah sebelumnya meratifikasi Protokol Kyoto. Namun kebijakan ini gagal ditetapkan karena ditolak oleh Parlemen dan Senat. Namun, di tahun 2010, internal Partai Buruh mengalami pergolakan politik sehingga menempatkan Julia Gillard sebagai Perdana Menteri yang baru. Sebagai Perdana Menteri wanita pertama, dapat dikatakan bahwa Gillard melakukan strategi dalam aspek lingkungan yang sama dengan ide Kevin Rudd untuk mengatasi permasalahan pencemaran udara karena emisi gas karbon dalam wadah CPRS. Tetapi, Gillard justru mengusulkan RUU Pajak Karbon disamping meneruskan ETS. Lain halnya pada masa pemerintahan Tony Abbott yang justru menolak pajak karbon pada awal diperkenalkan bahkan berhasil menghapuskan kebijakan lingkungan ini setelah menang pemilu tahun 2013 dan menggantikan Julia Gillard sebagai Perdana Menteri selanjutnya.

Pajak karbon mulai efektif diperkenalkan kepada masyarakat Australia sejak tanggal 1 Juli 2012 (<http://ris.dpmmc.gov.au> diakses 2 Desember 2015). Skema utama dari kebijakan ini berupa tambahan pajak yang harus dibayarkan berdasarkan sumbangan terhadap emisi karbon yang telah dihasilkan. Pajak tersebut dibebankan kepada 75.000 pengusaha penghasil emisi selama tahun 2013-2014. Namun pajak karbon di Australia mengalami banyak hambatan dalam proses pelaksanaannya. Penolakan dari beberapa kalangan seperti kelompok kepentingan dibidang industri yang dikenakan pajak serta Pemerintah Oposisi dari Partai Liberal membuat kebijakan ini pada akhirnya harus dihapuskan dari kebijakan dalam negeri Australia. Pajak ini tidak hanya dibebankan kepada pengusaha saja, namun masyarakat Australia juga merasakan dari kenaikan harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan besar yang dikenakan wajib pajak biasanya membebaskan sebagian atau seluruh biaya pajak kepada pelanggan, usaha kecil bahkan rumah tangga.

Penolakan terhadap penetapan pajak tersebut digunakan oleh Tony Abbott untuk menaikkan elektabilitas partai politiknya dalam pemilu tahun 2013. Tony Abbott mengusung janji kampanye untuk menghapuskan kebijakan pajak karbon. Pada tanggal 17 Juli 2014 kebijakan pajak karbon dihapuskan dengan kemenangan suara 39 setuju menghapus dan 32 menolak. Secara garis besar, penghapusan ini berdampak pada politik Australia yang juga mempengaruhi ekonomi negaranya. Pada dasarnya, ekonomi politik dijadikan negara sebagai alat dalam mengatur perekonomian masyarakat. Dampak penghapusan ini juga memberikan perspektif positif dan negatif dalam penerapannya. Penghapusan pajak karbon juga menuai banyak respon dari berbagai negara dan media internasional. Pasalnya Australia merupakan negara

penghasil emisi terbanyak sehingga menjadikan Australia sebagai negara terbelakang dalam mengatasi perubahan iklim akibat penghapusan kebijakan tersebut, (<http://www.wsj.com> diakses 11 Oktober 2016). Seharusnya dengan penerapan pajak karbon membuktikan bahwa Australia dapat menunjukkan keseriusan untuk mengatasi permasalahan lingkungan dengan berusaha mengurangi jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Namun, kebijakan ini justru terjadi penolakan dari beberapa pihak karena dirasa cukup merugikan dari segi ekonomi Australia. Sehingga kebijakan ini harus dihapuskan dan diganti dengan kebijakan lain yang dianggap lebih baik oleh pemerintahan Tony Abbott dan pada akhirnya menimbulkan beberapa dampak ekonomi dan politik akibat dihapuskannya pajak tersebut.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Konsep Pajak Karbon (Carbon Tax)***

Pajak Karbon merupakan kebijakan alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Kegiatan yang menghasilkan emisi karbon relatif terlalu murah karena individu tidak akan mempertimbangkan biaya emisi. Dengan adanya kewajiban membayar pajak individu akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan emisi karbon tinggi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan-perusahaan (<http://www.pksi.depkeu.go.id> diakses 20 April 2016). Pajak atas bahan bakar fosil akan memicu peningkatan harga bahan bakar tersebut. Secara teori, seseorang akan mengurangi pemakaian bahan bakar ketika harganya naik. Dengan kata lain, pemerintah dapat menyelamatkan lingkungannya dengan menerapkan fitur pajak tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan sebuah negara terhadap Protokol Kyoto. Dalam rancangan pajak terdapat tiga isu sentral: basis pajak (termasuk kemungkinan offset atau kredit), tarif pajak (termasuk masalah distribusi, penggunaan pendapatan, dan perubahan tingkat pajak), dan perdagangan. Ketiga rancangan tersebut terkait dengan perdagangan karbon intensif (PDF, Gilbert E. Metcald dan David A. Weisbach, hal 1-2).

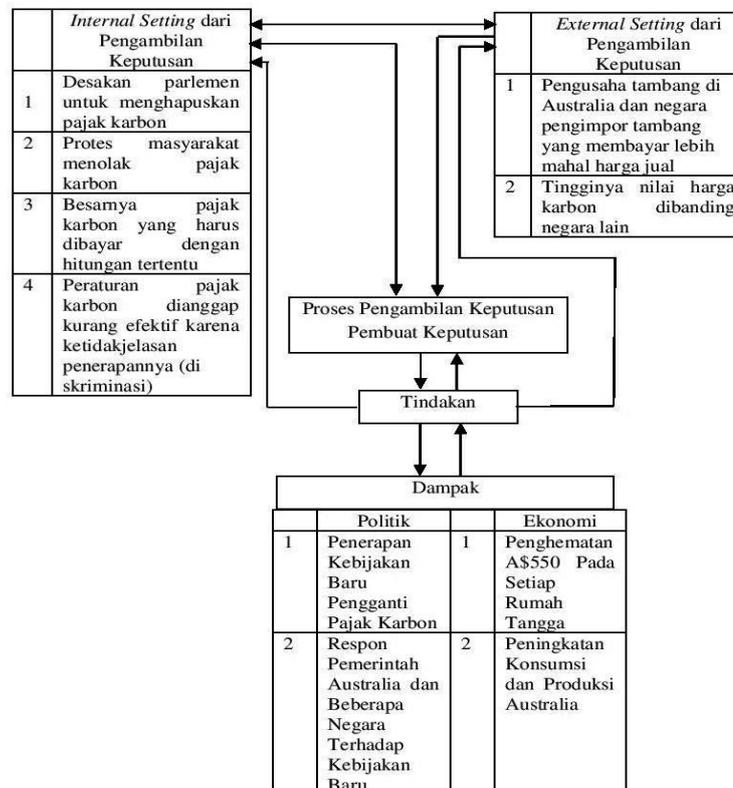
Australia sendiri menerapkan kebijakan pajak tersebut pada tahun 2012. Perusahaan wajib membayar pajak karbon melalui sistem pajak bahan bakar atau pungutan gas rumah kaca sintetis. Pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar A\$23/ton emisi (<http://www.carbontax.org> diakses 21 Agustus 2016). Pajak karbon dibuat melalui undang-undang Parlemen, termasuk Undang-Undang Energi Bersih. Terdapat sekitar 1.000 halaman utama yang mengatur mengenai legislasi tersebut. Kewajiban pajak karbon dikeluarkan sampai dengan 30 Juni 2014 dan harus diselesaikan secara penuh. Prinsip utama yang mendukung integritas sistem perpajakan Australia yaitu dengan mengumpulkan semua kewajiban pajak tersebut. Sekitar 75.000 pengusaha yang bertanggung jawab membayar pajak karbon selama tahun 2013-2014. Pengusaha yang wajib membayar meliputi beberapa sektor, termasuk sektor listrik, manufaktur, limbah, pertambangan, produksi gas, penerbangan dan transportasi non-road, serta penggunaan mesin pendingin (<http://www.environment.gov.au> p. 1 diakses tanggal 22 Mei 2016).

**Teori Pengambilan Keputusan**

Secara umum, politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Studi politik luar negeri, menurut Henry Kissinger, berada pada interseksi antara aspek dalam negeri (domestik atau internal) suatu negara dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. James N. Rosenau menambahkan, di dalamnya termasuk aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara. Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi dalam menghadapi unit politik internasional lainnya yang dibuat oleh pembuat keputusan negara (*decision maker*) dalam rangka mencapai tujuan spesifik nasional dalam terminologi *national interest*. (<http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id> diakses pada 13 Maret 2015).

Pembuatan keputusan dapat diartikan sebagai tindakan memilih berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan negara. Model pembuatan keputusan, yang dikembangkan oleh Richard Snyder, merupakan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks, berbagai faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara.

**Gambar 1: Penerapan Model Snyder Tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Dampak Penghapusan Pajak Karbon**



Sumber: PDF, Richard C. Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin

Pendekatan Snyder menempatkan aktor dalam berbagai konteks sosial yang berbeda, dan memandang keputusan atau hasil tindakan para aktor tersebut sebagai fungsi dari atau dipengaruhi oleh konteks itu. Snyder mengungkapkan adanya internal dan eksternal setting yang mempengaruhi pembuatan keputusan (<http://www.acsu.buffalo.edu> hal 201 diakses 13 Maret 2015).

Dalam penelitian ini pendekatan Snyder digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghapusan pajak karbon di Australia yang dapat dilihat melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal penghapusan pajak karbon yaitu desakan parlemen untuk menghapuskan pajak karbon, protes masyarakat Australia menolak pajak karbon, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dengan hitungan tertentu, dan peraturan pajak karbon tidak efektif karena ketidakjelasan dalam penerepan (diskriminasi). Sedangkan faktor eksternal penghapusan pajak karbon yaitu pengusaha tambang di Australia dan negara pengimpor tambang yang membayar lebih mahal harga karbon, dan tingginya nilai harga karbon dibanding negara lain. Dari faktor internal dan eksternal penghapusan tersebut akan menghasilkan pula analisis dampak politik dan ekonomi berdasarkan gambar 1.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *study literature*. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif.

### **Hasil Penelitian**

Permasalahan lingkungan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Australia karena memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi dan politik. Pajak karbon adalah salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi masalah lingkungan di Australia dengan menetapkan target pengurangan emisi sebesar 5%. Namun kebijakan ini dianggap merugikan perekonomian Australia karena memiliki dampak negatif pada sektor tersebut. Masyarakat dan kelompok bisnis menolak kebijakan tersebut dan menuntut pemerintah agar dihapuskan. Pemerintahan Tony Abbott yang berasal dari Partai Liberal beserta koalisinya melakukan janji kampanye akan menghapuskannya jika terpilih pada pemilu selanjutnya. Hingga pemilu diadakan dan Tony Abbott berhasil memenangkan banyak suara sehingga pada 17 Juli 2014 pajak karbon berhasil dihapuskan.

Alasan penghapusan pajak karbon di satu sisi dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Australia kembali, namun di sisi lain juga menuai banyak respon dari berbagai negara dan media internasional. Pasalnya Australia merupakan negara penghasil emisi terbanyak sehingga menjadikan Australia sebagai negara terbelakang dalam mengatasi perubahan iklim akibat penghapusan kebijakan tersebut. Penghapusan pajak karbon di Australia berdampak pada politik Australia yang juga mempengaruhi ekonomi negaranya. Penerapan perspektif ini dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif dalam penerapannya.

## A. Politik

### 1. Penerapan Kebijakan Baru Pengganti Carbon Tax

Pasca penghapusan pajak karbon pada Juli 2014 yang dilakukan oleh Pemerintahan Tony Abbott, Koalisi Tony Abbott telah mengusulkan kebijakan *Direct Action Plan* (DAP) untuk mendukung program pengembangan pengurangan emisi CO<sub>2</sub> yang dilakukan oleh bisnis dan industri sebesar 5% pada tahun 2020. Pada 24 April 2014 ERF *White Paper* dikeluarkan dan disusul dengan *Energy Green Paper* pada 23 September. Pada tanggal 24 November 2014 *Carbon Farming Initiative Amendment Bill* 2014 lolos dalam Senat dan Parlemen yang mengawali lolosnya *Direct Action Plan*. Pusat rencana kebijakan ini adalah *Emission Reduction Fund* (ERF) yang memungkinkan industri dan bisnis untuk menjual pengurangan karbon ke Pemerintah (<http://www.environment.gov.au> diakses 10 April 2017).

ERF memberikan aturan pada industri yaitu tetap memiliki kewajiban mengurangi emisi meskipun pajak karbon telah dihapus. Industri penghasil emisi besar tetap diwajibkan membayar pajak ketika jumlah emisi yang telah dihasilkan melebihi ambang batas. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan pajak karbon dimana rumah tangga tidak dikenakan wajib pajak melainkan hanya industri penghasil emisi besar. ERF dilakukan melalui pembayaran langsung ke pemerintah kepada bisnis yang menghasilkan emisi di ambang batas. Hal ini dilakukan melalui proses pelelangan dimana penghasil emisi dapat menawarkan pengurangan emisi mereka dan penghasil emisi yang dapat mengurangi emisi dengan biaya terendah akan menang dalam lelang tersebut. ERF memiliki tiga komponen: (1) mengkredit pengurangan emisi, (2) membeli pengurangan emisi dan (3) menjaga pengurangan emisi (<http://www.mondaq.com> diakses 14 Agustus 2017). Berdasarkan penelitian dari *Climate Work* menunjukkan bahwa apabila dirancang dengan baik, ERF dapat secara efektif mengurangi emisi di Australia.

ERF didukung oleh berbagai inisiatif lain untuk memperluas penggunaan pembangkit energi terbarukan. ERF mendukung kebijakan DAP dengan menyediakan dana sebesar A\$2.5 juta untuk mengurangi emisi pada bisnis. Selain itu kebijakan DAP mendukung pembuatan teknologi baru melalui *Renewable Energy Target*. Teknologi baru tersebut menggunakan lebih dari 50 MW pada bidang energi surya, proyek panas bumi atau pasang surut air laut dan proyek gelombang (<http://www.energetics.com.au> diakses 10 Januari 2017). Adapun proyek yang dilakukan dalam ERFs terdapat dalam Lampiran hal 82. Secara khusus ERF dirancang untuk mengurangi emisi besar dengan meminimalkan biaya, seperti (<http://theconversation.com> diakses 14 Agustus 2017):

1. Mengolah limbah metana dari tambang batu bara agar emisi tidak keluar ke atmosfer
2. Melakukan perbaikan dalam bangunan komersial dan fasilitas industri agar lebih hemat energy
3. Mengurangi emisi melalui *carbon farming* (pertanian, aforestasi/penanaman pohon dan pengurangan deforestasi)

4. Berdasarkan *Emissions Reduction Fund White Paper*, pemerintah memiliki anggaran sebesar A\$2,55 miliar.
  
2. *Respon Pemerintah Australia dan Beberapa Negara Terhadap Kebijakan Baru*  
Meskipun DAP lolos dengan cukup mudah dibanding kebijakan sebelumnya, pemerintah Australia dan beberapa negara memberikan respon yang berbeda terhadap kebijakan baru pengganti pajak karbon tersebut. Senat Australia menanggapi bahwa DAP dan ERF yang diusulkan pada dasarnya tidak efektif. Pemerintah mengabaikan prinsip "*polluter pays*" yang ada sebelumnya, dan sebaliknya mengusulkan agar secara efektif mensubsidi pembayar pajak yang merupakan pencemar besar emisi di Australia. Pemerintah Abbott tidak memberikan rincian mengenai pengembangan DAP dan tidak menjelaskan apa dasar kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintahan sebelumnya mencoba untuk memperkenalkan kebijakan terkait perubahan iklim dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan dan usulan pemerintah sebelumnya, namun tidak dalam pemerintahan Abbott (<http://www.aph.gov.au> diakses 1 Juni 2017). DAP mendapat kritik dari beberapa pengamat kebijakan Australia seperti menteri lingkungan dan energi, Josh Frydenberg, dan Partai Hijau bahwa skema yang telah dirancang tersebut tidak cukup untuk mengurangi emisi sesuai target Australia tahun 2020 (<http://www.abc.net.au> diakses 14 Agustus 2017).

Melalui perundingan perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara maju diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai target pengurangan, kebijakan domestik dan aspek-aspek lain dari kebijakan pemanasan global. Pada bulan April 2015, Fairfax Media mengungkapkan bahwa Australia berada di bawah pengawasan ketat dari China, Brazil, dan Amerika Serikat, mengenai ambisi target emisi dan efektivitas skema DAP. Amerika Serikat (AS) mempertanyakan apakah Australia mempertimbangkan langkah-langkah lain untuk mengurangi emisi di luar DAP. Sedangkan Brasil menganggap Australia memiliki "tingkat keinginan rendah" terhadap target pengurangan emisi dan mempertanyakan apakah Australia akan melakukan upaya pengurangan emisi dengan penerapan DAP (<http://www.smh.com.au> diakses 1 Juni 2017).

China juga beranggapan apakah dana pengurangan emisi (ERF), inti dari kebijakan DAP, akan cukup untuk memenuhi target Australia untuk mengurangi emisi sebesar 5% tahun 2020. Sedangkan juru bicara perubahan iklim Hijau Larissa Waters mengatakan negara-negara lain telah mengajukan pertanyaan yang benar tentang Australia dan sebagai tanggapannya ia mengatakan bahwa pemerintah Abbott telah menghasilkan banyak usaha untuk menutupi kelambanannya terhadap perubahan iklim.

## *B. Ekonomi*

### *1. Penghematan A\$550 Pada Setiap Rumah Tangga*

Menurut *Australian Treasury*, penghapusan pajak karbon akan mengurangi biaya hidup rata-rata di semua rumah tangga mencapai A\$550 lebih rendah. biaya hidup rata-rata di semua rumah tangga mencapai A\$550 lebih rendah.

Harga listrik lebih rendah sekitar 9% dan harga gas sekitar 7%. Rata-rata tagihan listrik rumah tangga mencapai A\$200 lebih rendah dan tagihan gas \$70 lebih rendah daripada ketika ditetapkan pajak karbon. Selain itu penghapusan pajak karbon akan mengurangi Indeks Harga Konsumen sekitar 0.7% dari A\$25.40. Menghapus pajak karbon akan menghilangkan beban administrasi dan kewajiban pada bisnis yaitu sekitar A\$85 miliar per tahun (<http://www.environment.gov.au> diakses 10 April 2017).

*The Australian Competition and Consumer Commission's* telah menghitung penghematan biaya langsung dari A\$153 sampai A\$269 pada listrik dan gas alam setelah penghapusan pajak karbon pada tahun 2014. Penghematan biaya lainnya berasal dari sektor lain seperti TPA, tarif dan biaya dewan, manufaktur makanan, biaya air dan transportasi. Menteri Usaha Kecil, Bruce Billson, menegaskan bahwa pajak karbon akan berbahaya untuk bisnis dan rumah tangga. Pajak karbon akan meningkatkan tagihan listrik untuk bisnis dan rumah tangga serta merugikan pekerjaan dan industri (<http://www.news.com.au> diakses 2 Januari 2017).

## 2. Peningkatan Konsumsi dan Produksi Australia

Setelah penghapusan pajak karbon, konsumsi energi di Australia mengalami peningkatan dalam bisnis dan industri yang dikenai pajak cukup tinggi dalam pajak karbon. Dari tabel 4.1 dapat dilihat perubahan jumlah konsumsi energi berdasarkan industri setelah pajak karbon ditetapkan dan setelah pajak karbon dihapuskan. Konsumsi energi pada sektor listrik (termasuk bahan bakar untuk pembangkit listrik) menurun 3% pada tahun 2013-2014 dari tahun sebelumnya sehingga permintaan listrik berkurang pada pasar listrik nasional.

**Tabel 4.1 Konsumsi Energi Tahun 2013-2016**

	2012- 2013	2013- 2014	2014- 2015	2015- 2016
<b>PJ (Petajoules)</b>				
Transportasi	1,545	1,589.2	1,612.9	1,641.5
Listrik	1,626	1,575.6	1,666.9	1,677.6
Tambang	486	531.1	520.7	547.1
Residen	454	449.0	456.0	343.4
Komersial	308	315.8	336.2	
Pertanian	99	99.7	104.4	105.9
Pembangunan	25	26.7	27.2	-
Lain-lain	66	58.0	48.2	-
<b>Total</b>	<b>5,884</b>	<b>5,831.1</b>	<b>5,919.6</b>	<b>5,473.2</b>

Sumber: Australian Government-Department of Industry, Innovation and Science

Namun naik 5% pada tahun 2014-2015 karena menanggapi peningkatan permintaan listrik pada pasar listrik nasional dan peningkatan pangsa batubara dalam campuran bahan bakar (Tabel 4.1) (<http://www.industry.gov.au> diakses 26 November 2016).

Transportasi menyumbang 27% dari konsumsi energi Australia. Peningkatan penggunaan energi dalam transportasi udara mengakibatkan peningkatan 1% di sektor transportasi tahun 2013-2014 namun di tahun 2014-2015 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan aktivitas penerbangan khususnya angkutan umum. Sebaliknya penggunaan energi pada transportasi darat yang menyumbang hampir tiga perempat dari konsumsi energi relatif datar namun naik 2% tahun 2014-2015. Di tahun 2015-2016 transportasi udara meningkat 3%. Pangsa sektor transportasi pada total konsumsi energi meningkat menjadi 42% pada 2015-2016. Penggunaan energi di sektor ini tumbuh sebesar 0.7% setiap tahun yang sebagian besar didorong oleh industri angkutan barang.

Pertumbuhan dalam sektor tambang lebih lambat dari beberapa tahun terakhir karena adanya pengurangan pada intensitas energi industri pertambangan. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi energi di sektor pertambangan adalah yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di sektor lain. Batu bara yang dikonsumsi pada tahun 2013-2014 menyumbang 32% dari total konsumsi energi. Pada tahun ini konsumsi batu bara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sejak diterapkannya kebijakan pajak karbon. Sedangkan pada tahun 2014-2015 konsumsi batu bara naik 3% hingga tahun 2015-2016. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan penggunaan batu bara pada sektor listrik yang merupakan dampak dari tidak adanya lagi kewajiban membayar pajak karbon. Konsumsi energi pada sektor perumahan turun 1% pada tahun 2013-2014.

Dalam produksi energi yang digunakan untuk konsumsi di Australia juga mengalami peningkatan. Dalam produksi energi primer terdapat beberapa produk, seperti batubara, gas, minyak, LPG dan energi terbarukan. Produksi batubara meningkat sebesar 8% tahun 2013-2014 mencapai 11,807 petajoules (sekitar 428 juta ton). Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya peningkatan produksi di beberapa industri, seperti Ulan, Beltana, dan operasi Ravensworth North Opencut dan penyelesaian kapasitas baru di Caval Ridge dan North Goonyella. Pada tahun 2014-2015 produksi batubara meningkat sebesar 4% mencapai 12,288 petajoules hingga tahun 2015-2016 mencapai 12,59 petajoules. Produksi gas alam relatif tetap di tahun 2013-2014 yaitu kurang dari 2% mencapai 2,479 petajoules seperti produksi dari pabrik baru pengolahan gas Macedon di Australia Barat. Sedangkan pada tahun 2014-2015 naik sebesar 5% yaitu 2,607 petajoules. Adanya sumur bor baru di Queensland yang siap memulai ekspor LNG dari Gladstone tahun 2014-2015 menjadi faktor kenaikan dalam sektor ini. Sedangkan produksi minyak dan gas alami mengalami penurunan 5% pada tahun 2013-2014 dan 2014-2015 yaitu 745 petajoules (sekitar 20 miliar liter). Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan produksi di negara bagian timur. Sedangkan pada tahun 2015-2016 total produksi energi di Australia tumbuh 1,3% karena adanya permintaan global

untuk batubara yang terus meningkat sebagai akibat dari meningkatnya permintaan listrik dan pembuatan bahan baku baja, khususnya di negara berkembang seperti pasar Asia. Produksi dalam gas pada tahun ini meningkat sebesar 27% dari total produksi energi yaitu 2,5% dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama produksi minyak mentah dan LPG naik menjadi 2,2% dari total produksi energi.

Pada produksi energi untuk pembangkit listrik pada tahun 2013-2014 pembangkit listrik di Australia menurun 0,6%. Total pembangkit listrik telah menurun 254 terawatt tahun 2010-2011 menjadi 248 terawatt tahun 2013-2014. Hal ini berhubungan dengan permintaan yang lebih rendah untuk listrik. Penurunan permintaan industri disebabkan oleh penurunan aktivitas dan tanggapan konsumen terhadap harga listrik yang lebih tinggi karena adanya pungutan harga karbon. Berbeda di tahun 2014-2015, pembangkit listrik meningkat hampir 2% dengan jumlah 252 terawatt meskipun masih di bawah jumlah pada tahun 2010-2011. Pertumbuhan ini mencerminkan permintaan pada listrik termasuk sektor komersial dan perumahan. Pembangkit listrik yang dihasilkan dari batubara (hitam dan coklat) meningkat 0,5% di tahun 2015-2016. Energi terbarukan untuk pembangkit listrik di Australia meningkat menjadi 15% tahun 2013-2014 dan turun 7% pada tahun 2014-2015. Hal ini dikarenakan turunnya tingkat air di bendungan air khususnya di Tasmania. Sehingga permintaan energi air turun dibawah 50% pada tahun 2014-2015. Penurunan pembangkit listrik tenaga air ini juga terjadi karena tidak adanya harga karbon sehingga meningkatkan permintaan pembangkit listrik melalui bahan bakar.

Pajak karbon merupakan salah satu bentuk ketaatan Australia terhadap Protokol Kyoto. Selain itu merupakan bentuk penggunaan teknologi ramah lingkungan karena masyarakat dan pengusaha merubah sebagian cara hidupnya dengan lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga pemerintahan Julia Gillard pada saat memimpin Australia membentuk kebijakan pajak karbon untuk mewujudkan bentuk ketaatan tersebut. Namun sejak dilaksanakan sampai dilakukan beberapa kali perubahan hingga akhirnya dihapuskan internal Australia merasa keberatan terhadap penerapan tersebut.

Desakan parlemen membuat kebijakan ini harus dihapuskan. Kemenangan Tony Abbott dari Partai Liberal dalam pemilu tahun 2013 membuat kebijakan ini berhasil dihapuskan. Ini merupakan internal setting dalam penghapusan pajak karbon yang harus dilakukan pemerintahan Julia Gillard karena dianggap memiliki lebih banyak dampak negatif. Alasan dominan penghapusan karena besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dengan hitungan tertentu. Selain itu, peraturan pajak karbon dianggap kurang efektif karena adanya ketidakjelasan dalam penerapannya. Dalam hal ini terdapat beberapa sektor tertentu yang menghasilkan emisi besar namun tidak dikenai pajak karena dianggap servis publik. Hal ini dapat dilihat melalui peraturan pajak karbon yang menyatakan bahwa pertanian dan bahan bakar transportasi akan dibebaskan dari harga karbon. Padahal berdasarkan Laporan Gas Rumah Kaca Nasional 2007 Volume 1 yang dikeluarkan oleh Departemen Perubahan Iklim Australia pada tahun 2009 menjelaskan bahwa pertanian dan transportasi merupakan

faktor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sedangkan alasan eksternal berasal dari pengusaha tambang di Australia dan negara pengimpor tambang yang membayar lebih mahal harga jualnya. Tingginya nilai harga karbon yang diterapkan di Australia juga merupakan faktor eksternal pajak karbon dihapuskan. Sebab nilai harga karbon di Australia lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Irlandia (€15), Chili (\$5), Sweden (6 ore), serta Perancis, Finlandia, Inggris dan Selandia Baru.

Berdasarkan dampak penghapusan pajak karbon dapat dilihat bahwa dalam sektor ekonomi Australia kembali meningkat setelah menghapuskan pajak tersebut. Rumah tangga Australia juga mendapat keuntungan karena dapat menghemat pengeluaran bulanan mereka. Hal ini karena sudah tidak ada kewajiban bisnis dan rumah tangga membayar pajak dari emisi yang dihasilkan. Namun lain halnya dalam sektor lingkungan dimana penghapusan pajak karbon kurang efektif dalam mengurangi tingkat emisi di Australia. Berdasarkan situs resmi *Australian Government, Department of the Environment and Energy* tentang jumlah emisi nasional pada bulan Juni tahun 2000-2016 menyimpulkan bahwa penerapan pajak karbon efektif menurunkan emisi namun belum mencapai 80% di bawah level tahun 2000 pada tahun 2050 karena pada tahun 2014 kebijakan ini harus dihapuskan. Dalam hal ini emisi tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari tahun 2012 yaitu 551,8 Mt CO<sub>2</sub>-e menjadi 524,5 Mt CO<sub>2</sub>-e pada tahun 2014. Penurunan emisi ini terjadi pada saat pajak karbon diterapkan untuk mengurangi emisi. Namun Pada tahun 2015-2016 tingkat emisi naik dari tahun 2014 setelah pajak karbon dihapuskan dan diganti dengan kebijakan *Direct Action Plan* yang ditetapkan oleh Pemerintah Tony Abbott yaitu 524,5 Mt CO<sub>2</sub>-e menjadi 536,5 Mt CO<sub>2</sub>-e (<http://www.environment.gov.au> diakses 30 Mei 2017).

### **Kesimpulan**

Penghapusan Pajak Karbon di Australia dilakukan oleh pemerintah yang memimpin pada saat itu karena dianggap akan mengembalikan tingkat perekonomian Australia yang sempat turun. Hal ini dikarenakan adanya harga karbon yang membebani beberapa kalangan yang diwajibkan membayar akibat melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi di atas rata-rata. Pihak yang mendukung penghapusan pajak karbon tersebut melihat dampak positif yang akan terjadi dari penghapusan tersebut. Sedangkan bagi pihak yang menolak penghapusan pajak karbon menganggap keputusan ini akan membawa dampak negatif bagi Australia sendiri. Dampak negatif yang akan dirasakan Australia yaitu mengenai masalah lingkungan.

Dalam penelitian ini, digunakan teori pengambilan keputusan untuk menganalisis alasan penghapusan pajak karbon sehingga menghasilkan dampak politik dan ekonomi penghapusan pajak karbon di Australia. Penghapusan pajak karbon di Australia berdampak pada politik Australia yang juga mempengaruhi ekonomi negaranya. Dampak politik dapat dilihat dari pembentukan kebijakan baru yang diterapkan Tony Abbott untuk menggantikan pajak karbon guna mengurangi emisi 5% pada tahun 2020. Selain itu adanya berbagai respon dari pemerintah Australia dan beberapa negara terhadap pembentukan kebijakan baru pengganti pajak karbon tersebut. Dampak ekonomi yaitu penghematan sebesar A\$550 bagi setiap rumah tangga di Australia, meningkatkan ekonomi dengan peningkatan produksi dan konsumsi energi di Australia serta dampak lainnya mengenai tingkat emisi Australia.

**Daftar Pustaka**

**Media Elektronik**

Australian Government-Department of Industry, Innovation and Science, "Australian Energy Update 2013-2016", <<http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Australian-energy-statistics.aspx#>>, diakses 26 November 2016.

Australian Government-Department Of The Environment, "Repeal Of The Carbon Tax How The Carbon Tax Works", <[http://www.environment.gov.au/system/files/pages/59388d77-a9b5-4e4c-87b7-d732baf7c45b/files/factsheet-how-carbon-tax-works\\_1.pdf](http://www.environment.gov.au/system/files/pages/59388d77-a9b5-4e4c-87b7-d732baf7c45b/files/factsheet-how-carbon-tax-works_1.pdf)>, diakses 22 Mei 2016.

Australian Government-Department of the Environment and Energy, "The Emissions Reduction Fund-what it means for you", <<http://www.environment.gov.au/climate-change/emissions-reduction-fund/publications/what-it-means-for-you>>, diakses 10 April 2017.

Australian Government, Department of the Environment and Energy, "Quarterly Update of Australia's National Greenhouse Gas Inventory: June 2016", <<http://www.environment.gov.au/climate-change/greenhouse-gas-measurement/publications/quarterly-update-australias-national-greenhouse-gas-inventory-jun-2016>>, diakses 30 Mei 2017.

Australian Governance, Department of the Prime Minister and Cabinet, 'Australia's Plan for a Clean Future Regulation Impact Statement-Department of Climate Change and Energy Efficiency', <<http://ris.dpmpc.gov.au/2011/07/21/australia%E2%80%99s-plan-for-a-clean-energy-future-regulation-impact-statement-%E2%80%93-department-of-climate-change-and-energy-efficiency/>>, diakses 2 Desember 2015.

Carbon Tax Center, "Where Carbon Is Taxed", <<http://www.carbontax.org/?s=where+carbon+is+taxed>>, diakses 21 Agustus 2016.

Energetics, "The Coalition's Direct Action Plan: an overview", <[http://www.energetics.com.au/getmedia/45d0b04e-53c4-4b33-af6b-35e8f54a39ab/Direct-Action-Handout\\_An-overview\\_-part-1.pdf.aspx](http://www.energetics.com.au/getmedia/45d0b04e-53c4-4b33-af6b-35e8f54a39ab/Direct-Action-Handout_An-overview_-part-1.pdf.aspx)>, diakses 10 Januari 2017.

Index Mundi, 'CO2 emission (metric tons per capita)', CDIAC, Oak Ridge National Laboratory, United States, <<http://www.indexmundi.com/facts/indicators/EN.ATM.CO2E.PC>>, diakses 28 November 2015.

- Jennifer Mee and Renee Thomlinson, "Australia: Emissions Reduction Fund passed by Australian Parliament", Mondaq, 27 November 2014, <<http://www.mondaq.com/australia/x/357012/Clean+Air+Pollution/Emissions+Reduction+Fund+passed+by+Australian+Parliament>>, diakses 14 Agustus 2017.
- Metchald, Gilbert E. dan David A. Weisbach, PDF, 'The Design Of Carbon Tax', <[http://www.law.harvard.edu/students/orgs/elr/vol133\\_2/Metcalf%20Weisbach.pdf](http://www.law.harvard.edu/students/orgs/elr/vol133_2/Metcalf%20Weisbach.pdf)>, diakses 20 April 2016.
- News, "ACCC Report: Real cost of carbon tax revealed in monitoring report", 28 Juli 2015, <<http://www.news.com.au/finance/economy/accc-report-real-cost-of-carbon-tax-revealed-in-monitoring-report/news-story/26e32bf1c1a93419c58c2e78bcfe3e48>>, diakses 2 Januari 2017.
- PKKSI, 'Pajak dan Subsidi untuk Perubahan Iklim: Sebuah tulisan untuk menyambut pertemuan tingkat tinggi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim, Warsawa, Polandia, 8-9 Desember 2008', <<http://www.pksi.depkeu.go.id/pub.asp?id=14>>, diakses 20 April 2016.
- putrinyaperwira-fisip09, 2012, "Kebijakan Luar Negeri dan Proses Pengambilan Kebijakan", <[http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-64027-Teori%20Hubungan%20Internasional-Kebijakan%20Luar%20Negeri%20dan%20Proses%20Pengambilan%20Kebijakan.html](http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64027-Teori%20Hubungan%20Internasional-Kebijakan%20Luar%20Negeri%20dan%20Proses%20Pengambilan%20Kebijakan.html)>, diakses pada 13 Maret 2015.
- Skarbek, Anna, "Direct Action's here, but how will Australia cut carbon after 2020?", The Conversation, 31 Oktober 2014, <<http://theconversation.com/direct-actions-here-but-how-will-australia-cut-carbon-after-2020-33642>>, 14 Agustus 2017.
- Snyder, Richard C., H. W. Bruck and Burton Sapin, PDF, "Decision-Making and Decision-Makers", <<http://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20346/SnyderBruckSapin.PDF>>, hal 201, 13 Maret 2015.
- Talberg, Anita, Simeon Hui dan Kate Loynes, "Australian Climate Change Policy to 2015: a Chronology", Parliament of Australia, 5 Mei 2016, <[http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp1516/Climate2015](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1516/Climate2015)>, diakses 1 Juni 2017.
- Taylor, Rob dan Rhiannon Hoyle, 'Australia Becomes First Developed Nation to Repeal Carbon Tax', The Wall Street Journal, 17 Juli 2014 <<http://www.wsj.com/articles/australia-repeals-carbon-tax-1405560964>> diakses 11 Oktober 2016.
- The Sidney Morning Herald, "World's Media Respond to Carbon Tax Repeal", 17 Juli 2014 <<http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/worlds->

media-respond-to-carbon-tax-repeal-20140717-zu4kz.html>, diakses 29 Desember 2016.

Tom Arup, "Australia points to Direct Action in response to tough UN questions on climate responsibility", *The Sidney Morning Herald*, 2 Juni 2015, <<http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-points-to-direct-action-in-response-to-tough-un-questions-on-climate-responsibility-20150601-ghdz0x.html>>, diakses 1 Juni 2017.